

Analisis Penerapan Akuntansi Manajemen dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kinerja pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Salsabila Yusnia Adnin¹, Aprilia Hapsari², Shira Satirah Hidayat Putri³, Maurra Auliea An Nissa⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

E-mail Koresponden: salsabilayusnia789@gmail.com¹, apriliahapsari2016@gmail.com², shira.satirah1980@gmail.com³, maurraanisa@gmail.com⁴

Article Info

Article history:

Received 08/11/2025

Revised 09/11/2025

Accepted 12/11/2025

Abstract

Efficiency and effectiveness are important components in assessing the performance of a company, both in the public and business sectors. Efficiency and effectiveness are calculated by comparing expenses and income or actuals and budgets. Management accounting is crucial for boosting efficiency and effectiveness through relevant information for decision making, cost control, and strategic planning in both the corporate and government sectors. The primary objective of this research is to examine the implementation of management accounting in improving the efficiency and effectiveness of performance at PT Adhi Karya (Persero) Tbk and the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) using financial statement data for 2023-2024. The research was carried out using a combination of methods, specifically quantitative and qualitative techniques. The quantitative approach was used to analyze financial statements to determine the financial ratios and performance indicators of the two research objects. Meanwhile, The qualitative methodology served to illustrate the practices, policies, and context of management accounting implementation in both entities. Based on the analysis results, the Ministry of PUPR has better efficiency and effectiveness than PT Adhi Karya. This is influenced by the differences in characteristics and types of organizations between public sector companies such as PT Adhi Karya and state institutions such as the Ministry of PUPR. This finding illustrates the importance of implementing an accounting system that is appropriate to the characteristics and type of entity in order to optimize work performance so that efficiency and effectiveness can be achieved.

Keywords: Management Accounting, State-Owned Enterprise, Financial Report, Adhi Karya, Public Sector Accounting

Abstrak

Efisiensi dan efektivitas merupakan komponen penting dalam menilai kinerja suatu perusahaan, baik dalam sektor publik ataupun sektor bisnis. Efisiensi dan efektivitas dihitung melalui perbandingan antara beban dan pendapatan ataupun realisasi dan anggaran. Akuntansi manajemen berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan, pengendalian biaya, dan perencanaan strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi manajemen dalam mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas kinerja pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan menggunakan data laporan keuangan tahun 2023-2024. Penelitian ini dirancang dengan memadukan dua metode penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan pendekatan kuantitatif diperlukan dalam menganalisis laporan keuangan untuk mengetahui rasio keuangan dan indikator kinerja kedua objek penelitian. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan praktik, kebijakan, dan konteks penerapan akuntansi manajemen pada kedua entitas. Berdasarkan hasil analisis, Kementerian PUPR memiliki efisiensi dan efektivitas yang lebih baik dari pada PT Adhi Karya. Hal ini dipengaruhi karena adanya perbedaan karakteristik dan jenis organisasi antara perusahaan sektor publik seperti PT Adhi Karya dengan lembaga negara seperti Kementerian PUPR. Temuan ini menggambarkan pentingnya penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan karakteristik dan jenis entitas guna mengoptimalkan kinerja kerja sehingga efisiensi dan efektivitas dapat tercapai.

Kata Kunci: Akuntansi Manajemen, BUMN, Laporan Keuangan, Adhi Karya, Akuntansi Negara



PENDAHULUAN

Akuntansi manajemen jadi salah satu pondasi penting dalam mengelola organisasi modern, karena tugasnya menyediakan data yang berguna buat para pemimpin saat merencanakan, mengawasi, dan memutuskan strategi besar. Di tengah dunia bisnis dan pemerintahan yang makin rumit, fungsi akuntansi ini nggak cuma sebatas bikin laporan keuangan, tapi juga melibatkan analisis mendalam terhadap kegiatan sehari-hari agar organisasi bisa lebih efisien dan efektif. Dengan begitu, para pimpinan bisa memahami bagaimana biaya, produktivitas, dan hasil akhir saling berkaitan, sehingga keputusan mereka jadi lebih tepat dan didasari data yang akurat. Sekarang, dengan pertumbuhan ekonomi global dan persaingan yang semakin ketat, setiap organisasi—termasuk BUMN—harus pandai-pandai menghemat sumber daya sambil mencapai tujuan strategis. Di sisi lain, lembaga pemerintahan seperti kementerian juga menghadapi tekanan untuk lebih transparan, akuntabel, dan unggul dalam melayani masyarakat. Makanya, menerapkan akuntansi manajemen jadi kunci utama untuk mengatur keuangan dan operasional, sehingga anggaran bisa dipakai seefektif mungkin tanpa buang-buang.

Ambil contoh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, yang merupakan BUMN di bidang konstruksi dan punya peran besar dalam membangun infrastruktur negara. Sebagai perusahaan yang terdaftar di bursa, mereka wajib menunjukkan kinerja yang bagus melalui laporan keuangan yang jujur dan terpercaya. Di sini, akuntansi manajemen membantu mengendalikan biaya proyek, menyusun anggaran, dan menganalisis untung-rugi serta performa unit bisnis. Informasi dari sistem ini jadi acuan utama untuk menentukan strategi, mengecek proyek yang sedang berjalan, dan menilai keberhasilan operasional secara keseluruhan. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) fokus pada pelayanan publik dan kesejahteraan warga, bukan mencari keuntungan seperti BUMN. Tapi, prinsip efisiensi dan efektivitas tetap jadi tolok ukur utama dalam mengelola dana negara. Akuntansi manajemen di kementerian ini berguna untuk merencanakan kegiatan, mengawasi anggaran, dan mengevaluasi program kerja. Laporan keuangan mereka jadi alat penting untuk memastikan sumber daya publik digunakan optimal, sesuai dengan rencana strategis dan kerja pemerintah.

Laporan keuangan, baik di sektor swasta maupun publik, mencerminkan bagaimana akuntansi manajemen diterapkan sebenarnya. Lewat laporan ini, manajemen bisa menilai kondisi keuangan, operasional, dan pengelolaan sumber daya. Dalam penelitian ini, laporan keuangan jadi sumber utama untuk membandingkan penerapan akuntansi manajemen antara PT Adhi Karya dan Kementerian PUPR, yang punya karakter berbeda. Analisisnya akan mengungkap bagaimana keduanya mengelola biaya, mengalokasikan sumber daya, dan mencapai efisiensi serta efektivitas yang diinginkan. Penelitian ini menjawab beberapa pertanyaan kunci, seperti bagaimana akuntansi manajemen terlihat di laporan keuangan PT Adhi Karya, bagaimana diterapkan di Kementerian PUPR, dan bagaimana membandingkan tingkat efisiensi serta efektivitas keduanya berdasarkan data keuangan dan kebijakan manajerial. Meskipun PT Adhi Karya berorientasi pada laba dan Kementerian PUPR pada pelayanan, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa prinsip akuntansi manajemen bisa disesuaikan dengan baik di kedua konteks.

Tujuannya adalah menganalisis serta membandingkan penerapan akuntansi manajemen melalui laporan keuangan kedua entitas, dan melihat dampaknya terhadap peningkatan efisiensi serta efektivitas kinerja. Analisis ini nggak hanya soal teknis akuntansi, tapi juga bagaimana strategi manajerial, pengendalian internal, dan sistem pelaporan membantu capai target organisasi. Hasilnya diharapkan memberikan pandangan lengkap tentang hubungan antara akuntansi manajemen dan kinerja, baik di BUMN maupun pemerintahan. Penelitian ini punya dua keuntungan besar: akademis dan praktis. Secara akademis, ia bisa memperkaya pengetahuan di bidang akuntansi manajemen, terutama dalam konteks laporan keuangan di sektor publik dan BUMN. Ini bisa jadi referensi buat mahasiswa, peneliti, atau akademisi untuk memahami perbedaan dan kesamaan penerapan prinsip ini di berbagai sektor. Secara praktis, hasilnya bisa jadi bahan evaluasi dan saran buat manajemen PT Adhi Karya serta Kementerian PUPR agar sistem akuntansi mereka lebih efektif. Selain itu, bisa membantu pembuat kebijakan dalam menyusun strategi untuk efisiensi operasional, anggaran yang lebih baik, dan tata kelola keuangan yang transparan.

Secara keseluruhan, penelitian ini sangat relevan karena menunjukkan bagaimana akuntansi manajemen bisa jadi alat untuk mengukur, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja organisasi. Dengan membandingkan PT Adhi Karya dan Kementerian PUPR, kita bisa lihat bahwa walaupun mereka punya fokus berbeda, akuntansi manajemen tetap jadi dasar kuat untuk menciptakan organisasi yang hemat, efektif, dan kompetitif di tengah tantangan ekonomi dan pembangunan nasional. Menurut *National*

Associations of Accountants, akuntansi manajemen melibatkan proses mengidentifikasi, menilai, mengumpulkan, menguraikan, menyediakan, menafsirkan, dan menyampaikan informasi keuangan yang membantu manajemen dalam perencanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan perusahaan. Ini juga memastikan efisiensi penggunaan sumber daya ekonomi. Sementara itu, Alsharari (2024) mengatakan bahwa akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang fokus menyediakan data relevan buat pihak internal, terutama manajemen, untuk mendukung perencanaan, pengawasan, keputusan, dan evaluasi kinerja. Dari segi fungsi, akuntansi manajemen mencakup berbagai kegiatan seperti identifikasi, pengukuran, pengumpulan, analisis, hingga penyajian informasi yang berguna buat manajemen (seperti yang dijelaskan oleh Arkhipova et al., 2024). Tujuannya utama adalah memberikan data untuk perencanaan, pengendalian operasional, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja. Lewat sistem ini, perusahaan bisa memantau biaya, menentukan kebijakan investasi, dan menilai pencapaian target.

Kinerja organisasi dinilai dari dua aspek utama: efisiensi dan efektivitas. Efisiensi mengacu pada kemampuan memanfaatkan sumber daya (input) sebaik mungkin untuk hasil (output) yang diharapkan—semakin hemat, semakin bagus. Efektivitas menunjukkan seberapa sukses organisasi mencapai tujuannya. Kalau efisiensi dan efektivitas pegawai bagus, maka kualitas pelayanan, inovasi, dan produktivitas akan meningkat, seperti yang disampaikan Basri & Rosfiah (2022). Dalam akuntansi manajemen, informasi tentang biaya, anggaran, dan operasional jadi alat untuk memeriksa apakah kegiatan berjalan efisien dan efektif. Laporan dan analisis membantu membandingkan hasil aktual dengan target, sehingga manajemen bisa evaluasi dan ambil keputusan yang pas.

Penerapan akuntansi manajemen nggak hanya di sektor swasta, tapi juga di sektor publik seperti kementerian. Di sektor publik, ia menyediakan data akuntansi yang andal buat pimpinan untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan (Lakharis, 2021). Di BUMN seperti PT Adhi Karya, ini digunakan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi keuangan. Perbedaan dasar antara sektor publik dan swasta ada di tujuannya: sektor publik berfokus pada pelayanan masyarakat, sementara swasta pada laba. Tapi keduanya butuh akuntansi manajemen yang efektif untuk menerapkan prinsip *Value for Money*, yang meliputi ekonomi (penggunaan sumber daya hemat), efisiensi (rasio *input-output* optimal), dan efektivitas (capaian tujuan).

Laporan keuangan adalah sumber utama untuk analisis akuntansi manajemen, membantu menilai pengelolaan keuangan. Seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas, yang bisa mengevaluasi penggunaan aset dan strategi keuangan. Menurut Dimas & Ersi (2024), analisis laporan keuangan bertujuan memberi wawasan mendalam tentang kondisi finansial perusahaan, tidak hanya angka, tapi juga artinya. Ini membantu menilai kinerja keuangan, memantau perkembangan, dan mengidentifikasi risiko serta peluang. Untuk mengukur efisiensi dan efektivitas, kita pakai rasio keuangan seperti rasio likuiditas (untuk kemampuan bayar hutang jangka pendek), rasio profitabilitas (seperti ROA dan ROE untuk laba terhadap aset atau ekuitas), rasio hutang (untuk ketergantungan pinjaman), dan rasio efisiensi (seperti perputaran piutang atau persediaan). Di dunia bisnis yang semakin rumit, pengelolaan keuangan sangat krusial untuk kelangsungan perusahaan. Laporan keuangan jadi alat utama untuk memahami kondisi finansial, kinerja, dan aliran kas. Lewat analisis ini, manajemen bisa melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sehingga bisa ambil keputusan strategis yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi metode penelitian deskriptif komparatif dengan pendekatan campuran, yang mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pandangan lengkap. Metode deskriptif membantu menguraikan secara rinci penerapan akuntansi manajemen di dua entitas utama, sementara metode komparatif memungkinkan perbandingan antara praktik dan hasil kinerja di antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dengan instansi pemerintah seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Di sisi kuantitatif, kami menganalisis laporan keuangan melalui perhitungan rasio keuangan dan indikator kinerja untuk mengukur efisiensi dan efektivitas. Sementara itu, pendekatan kualitatif mendalami deskripsi praktik, kebijakan, dan konteks penerapan akuntansi manajemen di kedua lembaga tersebut.

Data yang digunakan bersumber dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan Kementerian PUPR. Untuk PT Adhi Karya, kami mengumpulkan informasi dari Laporan Keuangan Tahunan, *Annual Report*, *Sustainability Report*, Laporan Kinerja Perusahaan, serta dokumen resmi lainnya yang diakses melalui situs perusahaan dan Bursa Efek Indonesia (BEI), mencakup periode 2022–2024. Sementara untuk

Kementerian PUPR, data meliputi Laporan Keuangan Kementerian, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta publikasi resmi dari situs mereka, juga untuk periode yang sama. Seluruh data yang dikaji bersifat sekunder, dengan fokus pada laporan keuangan yang telah diaudit, laporan kinerja, publikasi resmi, literatur terkait, serta regulasi dan standar akuntansi yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi—seperti mengunduh laporan dari situs resmi PT Adhi Karya, BEI, Kementerian PUPR, dan portal Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)—serta studi literatur. Kami juga mengumpulkan dokumen pendukung seperti kebijakan akuntansi, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), dan bagian *Management Discussion and Analysis* untuk memahami lebih dalam praktik akuntansi manajemen. Data dari tiga tahun terakhir dikompilasi agar bisa dianalisis secara tren dan longitudinal. Studi literatur ini melibatkan tinjauan atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), teori akuntansi manajemen, hasil penelitian sebelumnya, serta peraturan pemerintah untuk memperkuat dasar teoritis dan regulasi.

Proses analisis data dibagi menjadi dua bagian utama: analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif melibatkan perhitungan rasio keuangan untuk menilai efisiensi dan efektivitas, di mana untuk PT Adhi Karya kami gunakan rasio seperti *Asset Turnover Ratio*, *Operating Expense Ratio*, *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Cost to Income Ratio*, dan *Working Capital Turnover*. Untuk Kementerian PUPR, rasio yang diterapkan mencakup Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Efektivitas Pendapatan, Rasio Kecerahan Belanja, *Variance Analysis*, serta *Cost per Output*. Kami juga melakukan analisis tren untuk melihat perubahan tahunan dan analisis struktur keuangan untuk mengevaluasi proporsi komponen keuangan di kedua entitas. Di sisi kualitatif, analisis bersifat deskriptif, menggambarkan penerapan akuntansi manajemen seperti sistem biaya (*job costing*, *process costing*, *Activity-Based Costing*), sistem penganggaran, *forecasting*, *performance measurement*, mekanisme pengendalian biaya, dan strategi penentuan harga. Instrumen yang dianalisis meliputi *master budget*, *flexible budget*, *standard costing*, *variance analysis*, *balanced scorecard*, dan *Key Performance Indicators (KPI)*, serta aspek seperti pelaporan manajemen, pengambilan keputusan, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan regulasi.

Analisis komparatif kemudian membandingkan elemen kunci antara PT Adhi Karya dan Kementerian PUPR, seperti perbedaan tujuan organisasi (orientasi profit versus pelayanan publik), standar akuntansi (SAK versus SAP), fokus kinerja (profitabilitas dan efisiensi versus akuntabilitas dan efektivitas), sumber dana (modal serta laba ditahan versus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dan sistem anggaran (*flexible versus fixed*). Kami juga membandingkan pengukuran hasil, di mana PT Adhi Karya mengandalkan indikator pendapatan dan margin laba, sedangkan Kementerian PUPR menekankan capaian program dan dampak pembangunan. Analisis ini mengeksplorasi perbedaan konteks operasional, metode pengukuran kinerja, tantangan implementasi, serta kesamaan dalam prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan peran akuntansi manajemen untuk keputusan strategis. Untuk menilai efektivitas, kami menggunakan indikator yang disesuaikan dengan masing-masing entitas. Di PT Adhi Karya, efektivitas diukur melalui pencapaian target laba, pertumbuhan pasar, tingkat penyelesaian proyek, kepuasan pelanggan, dan kualitas konstruksi. Sementara di Kementerian PUPR, indikatornya meliputi realisasi output program, target infrastruktur, dampak sosial, dan kualitas layanan publik. Analisis ini menyoroti peran akuntansi manajemen dalam empat area: perencanaan melalui penganggaran dan proyek strategis, pengendalian via *variance analysis* dan evaluasi kinerja, pengambilan keputusan dengan *cost-benefit analysis*, serta penilaian kinerja melalui KPI dan sistem penghargaan.

Kerangka analisis kami susun secara bertahap, mulai dari persiapan data (pengumpulan dan verifikasi), pengolahan (input, perhitungan rasio, dan tabulasi), analisis (interpretasi kuantitatif dan kualitatif, serta identifikasi temuan), hingga kesimpulan yang menghasilkan rekomendasi praktis dan teoritis. Keabsahan data dijaga dengan menggunakan laporan yang telah diaudit, verifikasi antar sumber, dan pemeriksaan konsistensi antar tahun, sementara keandalan hasil diperkuat melalui metode standar, dokumentasi proses, dan triangulasi antara pendekatan kuantitatif serta kualitatif. Secara keseluruhan, studi ini bertujuan memberikan gambaran mendalam tentang praktik akuntansi manajemen di kedua entitas, termasuk hasil rasio efisiensi, tabel perbandingan kinerja, analisis kesenjangan, praktik terbaik, dan rekomendasi perbaikan. Kami harapkan ini berkontribusi pada pengembangan literatur akuntansi manajemen, khususnya dalam membandingkan sektor publik dan BUMN di Indonesia.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Efisiensi dan efektivitas PT Adhi Karya (Persero) Tbk

PT Adhi Karya (Persero) Tbk merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor jasa konstruksi, konsultasi, dan pengembangan infrastruktur. Sebagai perusahaan terbuka (*go public*), PT Adhi Karya telah tercatat di bursa saham, sehingga informasi keuangan perusahaan dapat diakses secara terbuka melalui situs resmi maupun publikasi lainnya. Laporan keuangan tersebut menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan dalam menjalankan operasional dan pengelolaan sumber daya. Berdasarkan laporan keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk tahun buku 2023–2024, diperoleh data sebagai berikut :

Tahun 2023

Total aset = Rp 40.492.030.620.079

Laba bersih = Rp 289.882.510.819

Pendapatan = Rp 20.072.993.428.021

Beban Usaha = Rp 878.802.562.520

Tahun 2024

Total aset = Rp 35.042.781.072.073

Laba bersih = Rp 281.147.921.989

Pendapatan = Rp 13.351.717.203.356

Beban Usaha = Rp 925.956.007.243

Terdapat 3 komponen yang akan digunakan dalam mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pada PT Adhi Karya, yaitu rasio efisiensi biaya, *net margin profit*, dan perputaran aset. Rasio efisiensi biaya digunakan untuk mengukur besar biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.

$$\text{Rasio Efisiensi Biaya} = \frac{\text{Beban Usaha}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 PT Adhi Karya mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 878.802.562.520 untuk memperoleh pendapatan sebesar Rp 20.072.993.428.021 dalam periode tersebut. Sedangkan pada tahun 2024 PT Adhi Karya mengeluarkan biaya operasional yang lebih tinggi sebesar Rp 925.956.007.243 untuk memperoleh pendapatan sebesar Rp 13.351.717.203.356. Berdasarkan rincian data tersebut berikut ini adalah perhitungan rasio efisien biaya PT Adhi Karya pada tahun 2023-2024.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi Biaya tahun 2023} &= \frac{\text{Beban Usaha}}{\text{Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 878.802.562.520}{\text{Rp } 20.072.993.428.021} \times 100\% \\ &= 4,38\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi Biaya tahun 2024} &= \frac{\text{Beban Usaha}}{\text{Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 925.956.007.243}{\text{Rp } 13.351.717.203.356} \times 100\% \\ &= 6,94\% \end{aligned}$$

Selanjutnya, net profit margin dimanfaatkan untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam memperoleh laba bersih. Perhitungan net profit margin dilakukan dengan cara membandingkan laba bersih dengan total pendapatan yang diterima oleh perusahaan.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 PT Adhi Karya menghasilkan laba bersih sebesar Rp 289.882.510.819 dengan total pendapatan Rp 20.072.993.428.02. Kemudian pada tahun 2024 PT Adhi Karya memperoleh pendapatan sebesar Rp 13.351.717.203.356 dengan laba bersih sebesar Rp 281.147.921.989. Berdasarkan rincian data tersebut berikut ini adalah perhitungan *net profit margin* PT Adhi Karya pada tahun 2023-2024.

$$\begin{aligned}\text{Net Profit Margin 2023} &= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 289.882.510.819}{\text{Rp } 20.072.993.428.021} \times 100\% \\ &= 1,44\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Net Profit Margin 2024} &= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 281.147.921.989}{\text{Rp } 13.351.717.203.356} \times 100\% \\ &= 2,11\%\end{aligned}$$

Dalam dunia bisnis, perputaran aset merupakan salah satu indikator kunci yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif sebuah perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya asetnya guna menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya mencerminkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan mengelola investasi jangka panjang, seperti properti, peralatan, atau inventaris, agar dapat berkontribusi maksimal terhadap arus kas dan pertumbuhan keseluruhan. Dengan kata lain, perputaran aset membantu pemimpin perusahaan memahami apakah aset-aset yang dimiliki sedang "berputar" dengan optimal atau justru terjebak dalam ketidakefektifan, yang bisa menjadi peringatan dini untuk melakukan penyesuaian strategi.

Proses pengukuran perputaran aset sendiri dilakukan dengan cara membandingkan total pendapatan yang diperoleh selama periode operasional tertentu—seperti satu tahun fiskal—dengan nilai total aset yang dimiliki perusahaan pada akhir periode tersebut. Misalnya, jika sebuah perusahaan menghasilkan pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan aset yang relatif kecil, hal ini menunjukkan tingkat perputaran yang baik, yang berarti aset-aset tersebut telah dimanfaatkan secara efisien untuk menghasilkan laba. Sebaliknya, jika rasio ini rendah, itu bisa mengindikasikan masalah seperti aset yang kurang produktif atau pengelolaan yang buruk, yang mungkin memerlukan tinjauan ulang terhadap investasi atau operasi sehari-hari. Metode ini sederhana tapi kuat, karena ia mengintegrasikan data keuangan dari laporan laba rugi dan neraca, sehingga memberikan gambaran holistik tentang kesehatan finansial perusahaan.

Lebih dari sekadar angka, analisis perputaran aset memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan strategis, karena ia dapat membantu manajemen mengidentifikasi area di mana efisiensi bisa ditingkatkan, seperti dengan mengoptimalkan penggunaan aset tetap atau mengurangi aset yang tidak produktif. Di era ekonomi yang dinamis saat ini, di mana persaingan semakin ketat, memahami metrik ini menjadi krusial bagi perusahaan dari berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga layanan, untuk memastikan bahwa setiap investasi memberikan nilai tambah yang sepadan. Dengan demikian, perputaran aset tidak hanya sebagai alat pengukur, tetapi juga sebagai pendorong inovasi dan peningkatan kinerja jangka panjang, membantu perusahaan tetap kompetitif dan berkelanjutan di pasar global.

$$\text{Perputaran Aset} = \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Total Aset}}$$

Pada akhir tahun 2023, PT Adhi Karya tercatat memiliki total aset sebesar Rp 40.492.030.620.079 dan memperoleh pendapatan sebesar Rp 20.072.993.428.02. Kemudian pada akhir tahun 2024, PT Adhi Karya tercatat memiliki total aset sebesar Rp 35.042.781.072.073 dan memperoleh pendapatan sebesar Rp 13.351.717.203.356. Berdasarkan rincian data tersebut berikut ini adalah perhitungan perputaran aset PT Adhi Karya pada tahun 2023-2024.

$$\begin{aligned}\text{Perputaran Aset 2023} &= \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Total Aset}} \\ &= \frac{\text{Rp } 20.072.993.428.021}{\text{Rp } 40.492.030.620.079} \\ &= 0,50 \times\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Perputaran Aset 2024} &= \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Total Aset}} \\ &= \frac{\text{Rp } 13.351.717.203.356}{\text{Rp } 35.042.781.072.073} \\ &= 0,38 \times\end{aligned}$$

Tabel 1 Perhitungan Efektivitas dan Efisiensi PT Adhi Karya Tahun 2023-2024

Tahun	Pendapatan	Laba Bersih	Total Aset	Beban Usaha	Rasio Efisiensi	Net Profit Margin	Perputaran Aset
2023	Rp 20.072.993.428.021	Rp 289.882.510.819	Rp 40.492.030.620.079	Rp 878.802.562.520	4,38%	1,44%	0,50x
2024	Rp 13.351.717.203.356	Rp 281.147.921.989	Rp 35.042.781.072.073	Rp 925.956.007.243	6,94%	2,11%	0,38x

Sumber: Laporan Keuangan PT Adhi Karya Tahun 2023-2024, diolah (2025)

Pada tahun 2024 rasio efisiensi biaya terhadap pendapatan PT Adhi Karya mengalami peningkatan dari 4,38% pada tahun 2023 menjadi 6,94%. Hal ini menunjukkan adanya pengeluaran yang lebih besar untuk beban usaha dibandingkan dengan pendapatan. Peningkatan rasio ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh. Hal ini dapat dilihat dari adanya kenaikan beban usaha yang dikeluarkan dan penurunan pendapatan yang diperoleh antara tahun 2023 dengan tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam manajemen perusahaan khususnya dalam pengendalian biaya, sehingga menyebabkan menurunnya efisiensi kinerja perusahaan.

Perputaran aset mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. PT Adhi Karya mengalami penurunan rasio perputaran aset dari 0,50x pada tahun 2023 menjadi 0,38x pada tahun 2024. Ini berarti pada tahun 2023 setiap Rp1 aset mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp 0,50, sedangkan pada tahun 2024 hanya menghasilkan Rp 0,38. Kondisi tersebut mengindikasikan menurunnya efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan pada tahun 2024.

PT Adhi Karya memiliki peningkatan margin laba bersih dari 1,44% pada tahun 2023 menjadi 2,11% pada tahun 2024. Secara presentase laba bersih memang mengalami kenaikan, tetapi kenaikan ini tidak memiliki dampak yang sebanding terhadap laba bersih perusahaan. Pada tahun 2023 laba bersih yang didapat perusahaan adalah Rp 289,88 miliar tetapi laba bersih tahun 2024 mengalami penurunan menjadi Rp 281,14 miliar. Kenaikan margin laba ini disebabkan karena adanya penurunan pendapatan yang cukup signifikan sebesar Rp 6,72 miliar pada tahun 2024, bukan karena peningkatan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Dengan demikian, tingkat efektivitas perusahaan dalam memperoleh laba masih tergolong rendah.

Analisis Efisiensi dan efektivitas kementerian PUPR

Di Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah salah satu instansi pemerintah yang memainkan peran krusial dalam menangani berbagai aspek pembangunan nasional. Lembaga ini bertugas untuk merencanakan, menjalankan, serta memantau proyek-proyek infrastruktur yang esensial bagi kemajuan negara, yang mencakup segala hal mulai dari pembangunan jalan raya yang menghubungkan daerah-daerah terpencil hingga kota-kota besar, sehingga memastikan mobilitas dan konektivitas yang lebih baik untuk masyarakat. Selain itu, tanggung jawab mereka meluas ke pengelolaan sumber daya air, seperti pengaturan irigasi, pengendalian banjir, dan pemeliharaan sungai serta danau, yang sangat vital untuk menjaga kestabilan lingkungan dan mendukung sektor pertanian di berbagai wilayah.

Tak hanya berhenti di situ, Kementerian PUPR juga fokus pada pengembangan sistem drainase lingkungan yang efektif, yang membantu mencegah banjir dan menjaga kebersihan kota-kota, serta penataan bangunan gedung yang aman dan berkualitas, termasuk fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat-pusat komunitas yang dibutuhkan sehari-hari. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dengan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan berkelanjutan. Di samping semua itu, peran Kementerian PUPR dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat di seluruh penjuru Indonesia sangatlah penting, karena mereka bekerja untuk membangun dan memfasilitasi akses terhadap rumah layak huni, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah, melalui program-program seperti pembangunan rumah subsidi dan pemukiman baru, yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Secara keseluruhan, kontribusi Kementerian PUPR tidak bisa diremehkan, karena mereka membantu membentuk fondasi pembangunan yang kuat dan inklusif di Indonesia, dengan memastikan bahwa infrastruktur dan perumahan yang dikembangkan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Melalui koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, lembaga ini terus berupaya agar setiap proyek yang mereka tangani memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, sambil menjaga prinsip-prinsip keberlanjutan

dan efisiensi. Dengan demikian, Kementerian PUPR menjadi salah satu pilar utama dalam upaya membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Sebagai bagian dari instansi pemerintah, Kementerian PUPR memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas atas penggunaan dana negara. Laporan ini disampaikan kepada publik sebagai bentuk transparansi dan menjadi acuan dalam menilai sejauh mana kinerja kementerian tersebut efisien dan efektif.

Berdasarkan laporan keuangan Kementerian PUPR untuk tahun anggaran 2023–2024, diperoleh data sebagai berikut:

Tahun 2023

Anggaran = Rp182.020.000.000.000

Realisasi = Rp174.320.000.000.000

Tahun 2024

Anggaran = Rp181.622.395.942.000

Realisasi = Rp170.285.922.632.406

Di Indonesia, khususnya dalam konteks Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ada tiga elemen utama yang digunakan sebagai alat untuk menilai dan mengukur tingkat efisiensi serta efektivitas kinerja lembaga tersebut. Elemen-elemen ini meliputi persentase realisasi anggaran, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas, yang masing-masing memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana sumber daya keuangan dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Penggunaan ketiga komponen ini tidak hanya membantu dalam memantau kinerja tahunan, tetapi juga memastikan bahwa setiap program dan proyek yang dijalankan tetap selaras dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan, yang sangat penting di tengah tantangan anggaran pemerintah yang semakin kompleks.

Pertama, persentase realisasi anggaran berfungsi sebagai indikator kunci yang menggambarkan seberapa efektif suatu instansi pemerintah, seperti Kementerian PUPR, dalam memanfaatkan dana yang telah dialokasikan untuk berbagai kegiatan dalam periode waktu yang ditentukan. Misalnya, angka ini menunjukkan proporsi anggaran yang berhasil dieksekusi dibandingkan dengan total yang direncanakan, yang bisa mencakup pengeluaran untuk proyek infrastruktur atau program perumahan. Hal ini sangat relevan karena membantu mengidentifikasi apakah ada hambatan seperti keterlambatan administrasi atau masalah eksternal yang menghalangi pelaksanaan, sehingga pemerintah bisa melakukan penyesuaian lebih dini untuk menghindari pemborosan atau ketidakefektifan.

Kemudian, rasio efisiensi dan rasio efektivitas, sebagai komponen pendukung yang tak kalah penting, memberikan wawasan lebih dalam tentang aspek-aspek lain dari pengelolaan anggaran. Rasio efisiensi, misalnya, biasanya mengukur seberapa optimal penggunaan dana terhadap hasil yang diperoleh, sementara rasio efektivitas menilai sejauh mana tujuan program tercapai sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Ketiganya saling melengkapi, karena bersama-sama membentuk kerangka evaluasi yang holistik, yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melihat tidak hanya berapa banyak anggaran yang digunakan, tetapi juga kualitas dan dampak dari penggunaan tersebut terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, penerapan ketiga komponen ini dalam mengukur efisiensi dan efektivitas Kementerian PUPR bukan hanya formalitas, melainkan alat strategis yang membantu meningkatkan transparansi dan kualitas layanan publik. Dengan memantau aspek-aspek ini secara rutin, lembaga dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, seperti meningkatkan koordinasi antar-divisi atau mengatasi faktor eksternal yang mempengaruhi realisasi anggaran, sehingga pada akhirnya mendukung tercapainya sasaran pembangunan yang lebih luas, seperti infrastruktur yang berkualitas dan pemerataan akses perumahan bagi masyarakat Indonesia. Pendekatan seperti ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas internal, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya negara.

$$\% \text{ Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, kementerian PUPR memiliki rencana anggaran sebesar Rp182.020.000.000.000 dengan realisasi yang dapat diwujudkan sebesar Rp174.320.000.000.00. Sedangkan pada tahun 2024, kementerian PUPR memiliki rencana anggaran sebesar Rp181.622.395.942.000 dengan realisasi yang dapat diwujudkan sebesar Rp170.285.922.632.406. Berdasarkan rincian data tersebut berikut ini adalah perhitungan persentase realisasi anggaran kementerian PUPR pada tahun 2023-2024.

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Realisasi Anggaran 2023} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 174.320.000.000.000}{\text{Rp } 182.020.000.000.000} \times 100\% \\
 &= 95,77\% \\
 \\
 \% \text{ Realisasi Anggaran 2024} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 170.285.922.632.406}{\text{Rp } 181.622.395.942.000} \times 100\% \\
 &= 93,76\%
 \end{aligned}$$

Tabel 2 Perhitungan Efektivitas dan Efisiensi Kementerian PUPR Tahun 2023-2024

Tahun	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Output Tercapai	Rasio Efisiensi	Rasio Efektivitas
2023	Rp 182.020.000.000.000	Rp 174.320.000.000.000	95.77%	100%	95,77%	100%
2024	Rp 181.622.395.942.000	Rp 170.285.922.632.406	93.76%	100%	93,76%	100%

Sumber: Laporan Keuangan Kementrian PUPR Tahun 2023-2024, diolah (2025)

Dari data yang tersedia, kita bisa melihat bahwa kinerja pengelolaan anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2023 cukup mengesankan, di mana tingkat pelaksanaan anggaran berhasil mencapai 95,77% dari total alokasi sebesar Rp182,02 triliun. Selain itu, capaian output atau hasil yang diharapkan juga sepenuhnya terpenuhi, yakni mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa hampir semua program dan kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai harapan. Kemudian, pada tahun 2024, meskipun ada sedikit penurunan dalam tingkat pelaksanaan anggaran menjadi 93,76% dari total anggaran Rp181,62 triliun, kementerian ini tetap mempertahankan tingkat capaian output yang sempurna, yaitu 100%, sehingga menegaskan bahwa tujuan utama mereka masih tercapai tanpa terkecuali.

Hal ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan, Kementerian PUPR telah menunjukkan kemampuan yang kuat dalam mengelola dan memanfaatkan dana yang dialokasikan secara efektif serta efisien. Meskipun terjadi penurunan sekitar dua persen pada tahun 2024, angka tersebut masih berada di atas ambang batas yang dianggap optimal oleh standar pemerintah, yaitu di atas 90%, yang sering dijadikan patokan untuk menilai kinerja keuangan yang baik dan berkelanjutan. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti tantangan teknis dalam proses administrasi atau kendala operasional yang tak terduga, tetapi yang penting adalah bahwa hal tersebut tidak mengganggu atau menghambat pencapaian target kegiatan dan program yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dampaknya relatif kecil dan dapat dikelola dengan baik.

Dari perspektif efisiensi, kinerja Kementerian PUPR terlihat konsisten dan stabil, dengan rasio efisiensi yang mencapai 95,77% pada tahun 2023 dan 93,76% pada tahun 2024. Artinya, dana yang digunakan untuk berbagai proyek dan inisiatif benar-benar sebanding dengan hasil yang diperoleh, tanpa adanya pemborosan yang signifikan atau penggunaan yang berlebihan. Dengan kata lain, kementerian ini berhasil menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan output yang dihasilkan, yang merupakan indikator penting dari manajemen keuangan yang bijaksana, terutama di tengah kondisi ekonomi yang mungkin fluktuatif. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya fokus pada pemenuhan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Sementara itu, dari segi efektivitas, pencapaian 100% output selama dua tahun berturut-turut ini benar-benar patut diapresiasi, karena hal itu membuktikan bahwa semua program dan kegiatan yang dirancang telah dilaksanakan dengan presisi, sesuai dengan target serta indikator kinerja yang telah ditetapkan di awal. Ini berarti bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar menghasilkan dampak yang diinginkan, tanpa ada penyimpangan atau ketidaksesuaian yang berarti terhadap rencana kerja yang telah disusun. Dengan demikian, efektivitas ini tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis kementerian, tetapi juga komitmen mereka dalam memastikan bahwa sumber daya keuangan

dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas, seperti infrastruktur yang berkualitas dan layanan publik yang lebih baik.

Secara keseluruhan, jika kita menimbang kedua aspek ini efisiensi dan efektivitas maka dapat disimpulkan bahwa Kementerian PUPR memiliki rekam jejak pengelolaan anggaran yang luar biasa selama periode 2023–2024. Penggunaan dana yang dilakukan dengan teliti dan hati-hati telah menghasilkan keluaran maksimal, sambil mendukung tercapainya berbagai sasaran pembangunan yang telah direncanakan, seperti peningkatan infrastruktur dan pemerataan akses layanan dasar. Oleh sebab itu, tingkat efektivitas dan efisiensi yang dicapai oleh kementerian ini dapat dikatakan sangat tinggi, yang mencerminkan kekuatan institusional mereka dalam mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat luas. Pendekatan seperti ini tidak hanya menjaga akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan mendalam yang telah dilakukan terhadap laporan keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk serta laporan realisasi anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk periode 2023–2024, kita bisa melihat adanya perbedaan yang cukup mencolok dalam hal efisiensi dan efektivitas kinerja antara kedua pihak ini. Misalnya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengalami penurunan yang jelas dalam efisiensi dan efektivitas operasionalnya pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor eksternal dan internal seperti fluktuasi pasar atau tantangan manajemen. Penurunan ini terlihat secara nyata melalui peningkatan rasio biaya operasional, yang menunjukkan bahwa perusahaan mungkin belum sepenuhnya berhasil dalam mengontrol pengeluaran sehari-hari, sehingga mengurangi kemampuan untuk memaksimalkan laba. Selain itu, tingkat perputaran aset yang menurun mengindikasikan bahwa sumber daya perusahaan, seperti peralatan atau proyek-proyek yang sedang berjalan, belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar, yang pada akhirnya bisa memperlambat pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Lebih lanjut, margin laba yang tetap rendah selama dua tahun ini mencerminkan tekanan yang semakin besar pada profitabilitas, mungkin akibat naiknya biaya produksi yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan, atau bahkan pengaruh dari ketidakstabilan ekonomi yang membuat pendapatan tidak merata. Kondisi seperti ini seharusnya menjadi peringatan penting bagi manajemen perusahaan, sehingga diperlukan adanya tinjauan ulang yang komprehensif terhadap strategi operasional, pengelolaan proyek, dan pemanfaatan sumber daya, agar kinerja keuangan PT Adhi Karya bisa kembali stabil dan bahkan mengalami peningkatan yang berkelanjutan di masa depan—misalnya, melalui penerapan teknologi baru atau pelatihan karyawan untuk meningkatkan produktivitas.

Sebaliknya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan performa yang sangat mengesankan dalam efisiensi dan efektivitas kinerjanya selama dua tahun terakhir, yang menjadi bukti nyata dari kemampuan mereka dalam mengelola dana publik. Ini terlihat dari tingginya tingkat penyerapan anggaran, yang mencapai 95,77% pada tahun 2023 dan 93,76% pada tahun 2024, artinya sebagian besar dana yang dialokasikan telah berhasil digunakan dengan bijak untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, tanpa banyak pemborosan atau penundaan. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kemahiran kementerian dalam merencanakan dan mengelola anggaran secara teliti, tetapi juga kemampuannya untuk menyesuaikan rencana dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga menghindari masalah seperti inefisiensi yang sering muncul di sektor publik. Di luar angka-angka tersebut, efektivitas kinerja Kementerian PUPR juga terbukti melalui hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti peningkatan kualitas infrastruktur jalan raya, penyediaan perumahan yang lebih terjangkau, serta pengembangan fasilitas publik lainnya yang telah memberikan dampak positif, misalnya mengurangi kemacetan lalu lintas atau meningkatkan akses air bersih di daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa kementerian tidak hanya fokus pada pengeluaran dana, tetapi juga pada pencapaian hasil yang nyata dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang keseluruhan, perbandingan antara kedua entitas ini mengungkapkan bahwa Kementerian PUPR unggul dalam efisiensi dan efektivitas kinerja dibandingkan dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, yang sebagian besar disebabkan oleh pendekatan pengelolaan sumber daya yang lebih terstruktur dan terencana, dilengkapi dengan sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan setiap rupiah dana dimanfaatkan sebaik mungkin, serta fokus yang kuat pada hasil akhir yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Di sisi lain, PT Adhi Karya perlu segera memperkuat mekanisme pengendalian internal, seperti audit rutin atau analisis biaya yang lebih mendalam, untuk meningkatkan produktivitas aset dan menjaga kestabilan profitabilitas di tahun-tahun mendatang, sehingga perusahaan bisa bersaing lebih baik di pasar yang kompetitif. Analisis ini pada akhirnya menekankan betapa krusialnya penerapan prinsip Value for Money, yang melibatkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, tidak hanya di sektor publik seperti Kementerian PUPR, tetapi juga di sektor swasta seperti PT Adhi Karya, karena hal ini dapat membantu mencapai kinerja yang optimal dan berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat bagi negara secara keseluruhan. Dengan demikian, pelajaran dari perbandingan ini bisa menjadi acuan bagi berbagai pihak untuk terus meningkatkan standar pengelolaan sumber daya di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan anugerah-Nya yang luar biasa, sehingga kami bisa menyelesaikan karya ilmiah ini dengan lancar dan memuaskan. Sebagai bentuk penghargaan, kami ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Aryanto Nur, S.E., M.M., Ak., CPA., M.Ak., yang berperan sebagai dosen pengampu dan pembimbing, karena telah memberikan arahan serta dukungan berharga selama proses penulisan karya ini. Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kontribusi dalam menyelesaikan karya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Devinci, M. Y., Dekrita, Y. A., & Samosir, M. S. (2023). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA*, Volume 9 Nomor 2, halaman 51–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.59603/projemen.v9i2.44> (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025)
- [2] Garison, R. H., Noreen, E. W., & Brewer, P. C. (2021). *Managerial Accounting (17th ed.)*. McGraw-Hill Education. (Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025)
- [3] Gunawan Kurniasi. (2025). Strategi Manajemen Dalam Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Organisasi. *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains*, 2(2), 498–502. <https://doi.org/10.60145/jdss.v2i2.129> (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025)
- [4] Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2019). *Managerial Accounting: Creating Value in a Dynamic Business Environment (12th ed.)*. McGraw-Hill Education. (Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025)
- [5] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). *Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2023*. (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025)
- [6] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2024). *Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2024*. (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025)
- [7] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2025). *Tugas dan Fungsi*. <https://pu.go.id/page/Tugas-dan-Fungsi> (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025)
- [8] Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. (Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025)
- [9] Matondang, K. A., Pakpahan, G., Sitohang, H. S., Amanda, T., & Hanif, S. K. (2025). *Implementasi Akuntansi Manajemen dalam Menghasilkan SDM yang Efektif di Sektor Publik*. (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025)
- [10] Mulyadi. (2016). *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*. UPP STIM YKPN. (Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025)
- [11] Oktapiani, A., Irama, D., Pratiwi, F. A., Rahmawati, M. D. A., Dewi, N. A. A., & Fadilah, O. N. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Kendali Akuntansi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/rimba.v2i3.992> (Diakses pada tanggal 13 Oktober 2025)
- [12] Pemerintah Republik Indonesia. (t.t.). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010> (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025)
- [13] PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (2024). *Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2024 dan 2023*. https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202403/e25bbf8832_f006049b90.pdf (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025)
- [14] Supriyono. (2018). *Akuntansi Manajemen: Pengambilan Keputusan dan Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat. (Diakses pada tanggal 13 Oktober 2025)
- [15] Zalukhu, A. Y., Siregar, A. M., Sihombing, C. M., Silalahi, H. M. T., & Saragi, D. R. R. (2025). *Analisis Strategi Dan Penerapan Akuntansi Manajemen Dalam Meningkatkan Kinerja, Efisiensi, Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Manufaktur Di Indonesia*. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v3i7.6006> (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025)